

**INDEKS MASLAHAT SEBAGAI INDIKATOR ALTERNATIF
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN**

Dedi Junaedi

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Nasional (IAI-N) Laa Roiba Bogor

Sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) PD Bogor

dedijunaedi@mes-bogoraya.net

ABSTRACT

The national economic development of a country aims to improve the welfare of its people. There are various indicators of success that have been offered. Among others, gross domestic product (GDP), per capita income, human development index (HDI), people's welfare index (pledge) and economic welfare index (Eurostat). These indicators, from an Islamic perspective and perspective, still have weaknesses because they only display statistics in a worldly dimension, have not yet touched on the spiritual dimension or the transcendent aspect (ukhrawi). Therefore, Islam is here to introduce the concept of maslahat as an indicator of successful development. To measure it, the maslahat index was introduced. The indicators of benefit are developed according to the foundation of the maqasid sharia which includes safeguarding the five most important elements of human life: namely faith, soul, mind, descent, and wealth (wealth). From the five dimensions of maslahat, we can develop benefit parameters as an indicator of human development as a whole.

Keywords: *eurostat, ikrar, HDI, benefits, maqasid al-sharia, GDP*

نبذة مختصرة

الهدف الرئيسي من التنمية الاقتصادية للبلد هو محاولة لتحسين رفاهية شعبيها. تم تقديم العديد من (HDI) مؤشرات نجاح التنمية. بدءًا من الناتج المحلي الإجمالي والدخل الفردي ، ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر الرفاهية الشعبية (التعهد) ومؤشر الرفاه الاقتصادي (يوروستات). من منظور الإسلام ، لا تزال المؤشرات المختلفة تعاني من نقاط ضعف لأنها لا تعرض سوى إحصاءات القياس الدنيوية ، ولم تلمس بعد الجانب الأخرى (الأخرة). على هذا الأساس ، قدم الإسلام مفهوم مقاصد الشريعة أو الفائدة كمؤشر على نجاح التنمية. تشمل الفائدة التي يجب تحقيقها حماية خمسة عناصر أساسية للحياة البشرية: الإيمان (التوحيد) ، الروح ، العقل ، النسب ، والثروة (الثروة). من هذه العناصر الخمسة يمكننا تطوير عدد من معايير الفوائد كمؤشرات للتنمية البشرية الكاملة.

، مسلحات ، مقاصد الشريعة ، الناتج المحلي HDI الكلمات الرئيسية: الحيلة ، يوروستات ، الثروة ، تعهد ، الإجمالي

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional suatu negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ada berbagai indikator keberhasilan yang telah ditawarkan. Antara lain produk domestik bruto (PDB), pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kesejahteraan rakyat (ikrar) dan indeks kesejahteraan ekonomi (Eurostat). Indikator-indikator tersebut, dalam tinjauan dan perspektif Islam, masih memiliki kelemahan karena baru menampilkan statistik berdimensi duniawi, belum menyentuh dimensi spriritual atau aspek transenden (ukhrawi). Oleh karena itu, Islam hadir memperkenalkan konsep maslahat sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Untuk mengukurnya diperkenalkan indeks maslahat. Indikator kemaslahatan dikembangkan sesuai landasan maqasid syariah yang mencakup penjagaan lima unsur terpenting kehidupan manusia: yaitu keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta (kekayaan). Dari lima dimensi maslahat inilah kita bisa mengembangkan parameter kemaslahatan sebagai indikator pembangunan manusia seutuhnya.

Kata kunci: eurostat, ikRAR, IPM, maslahat, maqasid syariah, PDB

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional sebuah negara pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat yang menjadi warga negara terkait Berbagai program dan kebijakan pembangunan akan melahirkan proses produksi dan bergulirnya roda perekonomian. Kegiatan produktif berskala nasional diharapkan bermuara pada peningkatan pendapatan para pelaku ekonomi. Ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Dari sinilah muncul konsep pentingnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian dan atau dan atau pendapatan nasional. Indikatornya yang paling populer adalah besaran PDB/GNP. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDB/GNP riil negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

PDB dan Pendapatan Perkapita

PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$\text{PDB} = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + (\text{ekspor} - \text{impor}).$$

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara itu, pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

$$\text{PDB} = \text{sewa} + \text{upah} + \text{bunga} + \text{laba}$$

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran. PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. Jika pendapatan negara itu tinggi, maka pertumbuhan ekonominya juga cepat. Tetapi, sebaliknya jika pendapatan suatu negaraitu di bawah rata – rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah.

Di luar PDB, beberapa konsep muncul seperti indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kesejahteraan rakyat (ikrar) dan indeks kesejahteraan ekonomi (Eurostat). Jauh sebelum itu, Islam sejatinya sudah memperkenalkan konsep masalah sebagai esensi utama dari maqosid syariah atau tujuan diberkalukannya syariah Islam. Pertanyaannya, bagaimana indeks masalah dapat menjadi model pengukuran keberhasilan pembangunan. Melalui kajian berikut, penulis berupaya mengurai jawabannya sebagai sebuah upaya awal pemikiran alternatif .

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia.

Selain pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik PDB dan pendapatan per kapita, diperlukan adanya jaminan keamanan, tersedianya akses pendidikan dan layanan kesehatan dan pendidikan. Maka, berkembanglah konsep indeks pembangunan manusia (IPM).

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal (Dedi Junaedi, 2016).

Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan? Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Eurostat

Tahun 2008, Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, dan Jean-Paul Fitoussi mengembangkan wacana pengukuran kesejahteraan yang lebih komprehensif sebagai kritik atas ukuran statistik PDB dan pendapatan perkapita yang dinilai banyak kelemahan. Mereka menawarkan dua indikator utama: kesejahteraan dasar dan kesejahteraan ekonomi yang disebut sebagai standar UNECE/OECD/Eurostat.

Kesejahteraan dasar diukur melalui indikator: angka harapan hidup, persentase penduduk berpendidikan pasca sekolah menengah, deviasi suhu normal, lapisan ozon, ketersediaan air sesuai kualitas, dan fragmentasi habitat alami. Sedang kesejahteraan ekonomi diukur melalui indikator: kepemilikan aset finansial asing ril per kapita, modal produksi ril per kapita, modal natural per kapita, cadangan sumber energi, cadangan sumberdaya mineral, stok sumberdaya kayu, dan stok sumberdaya kelautan.

Ikrar

Belakangan, per Maret 2012, Pemerintah Indonesia meluncurkan instrumen baru yang disebut Indeks Kesejahteraan Rakyat (Ikrar). Indeks tersebut dihitung menggunakan tiga dimensi yakni keadilan sosial, ekonomi dan demokrasi.

METODE PENELITIAN

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Kajian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan studi literatur dari berbagai pandangan pakar, perkembangan teori dan aplikasi praktis dalam lintasan sejarah pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Alternatif: Perspektif Islam

Bagaimana Islam memandang berbagai ukuran keberhasilan pembangunan konvensional? Sepintas kita melihat berbagai ukuran keberhasilan pembangunan konvensional --mulai dari PDB dan pendapatan per kapita, HDI, Ikrar, dan Eurostat-- baru menyentuh angka-angka statistik dari indikator pembangunan yang berwawasan keduniawian (masalah dunia), belum menyentuh indikator pembangunan yang bernuansa ukhrawi (masalah akhirat).

Ukuran PDB dan pendapatan perkapita misalnya baru mencerminkan besarnya angka (kuantitas), bukan kualitas. PDB dan pendapatan yang tinggi bisa saja tidak selaras dengan kualitas kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa mengungkap apakah pertumbuhan ekonomi lahir dari proses produksi yang adil, bisnis yang halal, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Bukan mustahil pertumbuhan yang tinggi berasal dari praktik bisnis konglomerasi dan praktik monopoli korporasi, atau bisnis yang haram.

Indeks pembangunan manusia (HDI) baru mengukur capaian indikator sederhana dari masalah kebutuhan hidup yang paling dasar dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ikrar mungkin sedikit lebih baik dari HDI, karena sudah mempertimbangkan aspek keadilan sosial, ekonomi dan demokrasi. Tetapi, Ikrar --seperti halnya HDI-- masih terbatas pada aspek duniawiah dan sekularistik. Keadilan dan kualitas demokrasi yang diukur masih amat relatif, tergantung suara mayoritas. Tanpa bingkai nilai-nilai ukhrawi, sangat mungkin muncul fenomena diktator mayoritas dan tarani minoritas. Ukuran keadilan, kebenaran dan kesejahteraan masih relatif, tergantung pada suara terbanyak.

Sementara itu, indikator yang ditawarkan Eurostat (UNECE/OECD) secara vulgar bias kepentingan asing, kepentingan negara maju, dan

kepentingan environmentalis. Ukuran Eurostat akan sangat membebani sekaligus membatasi kreativitas negara-negara yang sedang berkembang. Apa urgensinya kepemilikan aset finansial asing menjadi ukuran keberhasilan pembangunan? Masuknya indikator ini dalam mengukur keberhasilan pembangunan amat beraroma ekspansi kekuatan asing melalui proses akuisisi dan privatisasi perusahaan lokal suatu negara. Ini berlawanan dengan upaya penegakan kedaulatan ekonomi. Indikator modal natural, cadangan energi, cadangan mineral, stok kayu dan sumberdaya kelautan mengisyaratkan kentalnya keinginan melakukan pengekakan atau semangat moratorium atas eksploitasi sumberdaya alam di negara-negara yang justru amat membutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Ini jelas amat bias kepentingan dunia Utara, dan sangat tidak adil bagi dunia Selatan.

Maqosid Syariah

Menurut Al-Gazhali, tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Maslahat yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada penjagaan/perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu: keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). As-Satibi kemudian mempopulerkannya dengan istilah *Maqasid al-Syariah*. Dia membagi maslahat dalam tiga tingkatan: *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*.

Dharuriyyat adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia; *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau memelihara lima unsur pokok; dan *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan tersier agar manusia dapat melakukan yang terbaik dan kondisi nyaman dalam upaya untuk lebih menyempurnakan emeliharaan lima unsur pokok: keimanan, jiwa, keturunan, akal, dan harta (kekayaan).

Indeks Kemaslahatan

Dari sisi *maqasid al-syariah*, Islam sesungguhnya bisa menawarkan indikator alternatif untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan sebuah negara. Dalam konteks ini, penulis menawarkan Indeks Kemaslahatan, yang di dalamnya merangkum ukuran kemaslahatan dari kelima unsur pokok.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Yakni, masalahat keimanan, masalahat jiwa, masalahat akal, masalahat keturunan, dan masalahat kekayaan (Dedi Junaedi dan Sri Hayatin Nufus, 2019).

Indeks masalahat bisa diukur dengan pendekatan mengembangkan indikator-indikator penting untuk menjawab setidaknya dua pertanyaan: pertama, apakah program, kebijakan, kegiatan, produksi bermaslahat bagi keimanan, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kedua, seberapa besar dampak masalahatnya?

Contoh Indikator Kemaslahatan

	Indikator (Kebijakan/Program/Kegiatan/Produk)
Maslahat Iman	Bermaslahat bagi agama? Meningkatkan iman dan takwa? Mendorong ketaatan beragama?
Maslahat Jiwa	Bermaslahat bagi jiwa manusia Menyehatkan jiwa Menyegarkan jiwa Tidak merusak/tidak membayakan jiwa
Maslahat Keturunan	Bermaslahat bagi anak cucu Memperbaiki generasi Tidak merusak generasi
Maslahat Akal	Meningkatkan kecerdasan Meningkatkan semangat belajar Mendukung orang bersikap logis Tidak merusak akal
Maslahat Harta	Bermaslahat bagi harta/kekayaan Meningkatkan produktivitas Meningkatkan nilai tambah Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan

Maslahat Keimanan

Dalam Islam, segala kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, perdagangan dan distribusi, ha-rus diikat dalam konsep tauhid. Manusia berproduksi karena memenuhi perintah Allah, sebagaimana firman-Nya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(QS Al Mulq (67):15).

Seorang Muslim ketika menanam, bekerja atau berdagang, merasa amalnya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Semakin banyak amal baiknya, semakin bertambah pula takwa dan taqorru-nya kepada Allah, seperti firman-Nya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS Al Baqarah (2):168).

Pertanyaannya, bagaimana kita mengukur kemaslahatan iman? Barangkali kita bisa mendekatinya dengan memetakan indikasi kualitas keimanan. Misalnya dengan menghadirkan data atau informasi tentang jumlah tempat beribadah per dalam satu lingkungan; jumlah shaf dalam shalat berjamaah harian; jumlah puasa sunah per pekan; jumlah shalat sunah muakkad per hari; jumlah shalat malam per pekan.

Bagaimana dengan pembangunan sektoral seperti lembaga keuangan Syariah? Perbankan syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan konvensional karena lebih mengutamakan keuntungan berdasarkan bagi hasil dan bukan riba seperti dalam Alqur'an surat al-Baqarah [2] ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kuat didalamnya."

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah tidak boleh hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional tapi juga harus mampu memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat dengan memperhitungkan penilaian dari perbankan syariah itu sendiri dengan mengukur indeks kesejahteraan masyarakat disekitar lingkungan perbankan syariah. Kegiatan yang menjadi keutamaan lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah adalah hubungan antara masyarakat selaku nasabah yang bukan sebagai kreditur dan debitur namun hubungan sebagai mitra, tidak semata-mata mencari laba sebesar-besarnya tetapi juga harus mampu mementingkan kegiatan badan usaha terbebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Dedi Junaedi, 2016).

Dari hal tersebut perbankan syariah sudah menjelaskan karakteristik yang berbeda dari perbankan konvensional yang bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang memberikan dan menawarkan produk-produk syariah berprinsip bagi hasil tetapi juga harus menjadi lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, memberikan kepuasan dengan pelayanan yang baik dan sumber daya insani yang mempuni.

Pada kenyataannya, jika pada evaluasi kinerja bank syariah yang lebih memprioritaskan aspek pencarian laba menjadi tantangan yang harus diselesaikan, kerena yang menjadi prioritas sebenarnya adalah tujuannya untuk kemaslahatan manusia secara universal. Banyak pandangan yang menyebutkan bahwa bank syariah dinilai kurang efisien dari segi kurang terkaji antara kinerja institusi keuangan Islam yang mencakup perspektif dari segi *maqashid syariah*. (Mohammed, Razak, & Taib, 2008, hlm.3), dan juga selama ini lembaga keuangan syariah masih diukur dengan indikator dan parameter dari lembaga keuangan konvensional, padahal sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan konvensional, yang seharusnya diukur oleh indeks yang syariah pula dalam hal ini adalah kemaslahatan yang memaksimalisasikan kesejahteraan masyarakat secara universal. Nilai- nilai yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah harus mampu mencerminkan makna dari kemaslahatan itu sendiri yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, bukan semata-mata hanya mementingkan masyarakat tertentu.

Maslahat Jiwa

Salah satu tujuan utama ekopnomi Islam adalah untuk mencapai kebikan dalam hidup (hayatan thayyibah), baik bagi Muslim sendiri maupun kebaikan bagi lingkungan sekitar bahkan alam semesta. Kemaslahatan jiwa, menurut Muhammad Abu Zahrah, bisa dalam bentuk memelihara jiwa dari hak hidup secara terhormat, terhindar dari penganiayaan, intimidasi, pembunuhan. Termasuk juga adanya jaminan kebebasan untuk berpikir, berpendapat, berkarya dan beraktivitas tanpa merugikan atau mengganggu hak orang lain. Bagaimana mengukur masalah jiwa? Ini bisa didekati dengan mendadar data dan sarana pendukung yang memungkinkan adanya perlindungan dan kepastian hukum. Misalnya, dengan data jumlah polisi per 1000 penduduk, jumlah pos pengaduan per wilayah, jumlah jaksa dam hakim yang adil per wilayah.

Maslahat Akal

Islam menjunjung tinggi peran akal. Ini penting untuk menjaga manusia agar terhindar dari kebodohan dan ketidakberdayaan, serta terpeliharanya akal dari jeratan dan tarikan hawa negatif yang menjadi sumber kerawanan sosial. Kemaslahatan akal bisa diukur dengan indikator seperti angka melek huruf, jumlah warga berpendidikan dasar 9 tahun, jumlah sekolah menengah per kecamatan, jumlah perguruan tinggi per kota, jumlah beasiswa gratis untuk anak dari keluarga miskin.

Maslahat Keturunan

Maslahan keturunan diperlukan untuk memelihara kelestarian jenis manusia, kejelasan nasab, keberlanjutan keturunan, serta terjalinnya hubungan keluarga dan kerabat dalam satu masyarakat. Islam menganjurkan setiap orang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Bahkan Islam mengatur secara rinci sistem warisan sebagai syariat untuk menjaga kemaslahatan individu, kelaurga dan masyarakatnya. Masalah keturunan bisa dilihat dari berfungsinya lembaga perkawinan, adanya peradilan agama, tersedianya fasilitas perumahan, sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Bagaimana mengukur masalah keturunan. Antara lain dapat ditawarkan dengan menggunakan parameter sejauh mana sebuah entitas ekonomi bia

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

menjamin berlanjutnya kehidupan reproduksi para pegawai atau karyawannya. Indikatornya dapat berupa upah minimum yang layak, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta jaminan pensiun dan hari tua. Juga tidak adanya diskriminasi gender.

Maslahat Harta

Ekonomi konvensional amat mengagungkan utilitas (nilai guna) barang dan jasa sebagai pemuas keinginan (*wants*) manusia. Sementara ekonomi Islam lebih mementingkan aspek kemaslahatan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan (*needs*) manusia. Besar kecilnya nilai maslahat suatu harta tergantung pada seberapa besar harta itu berperan dalam menjaga lima unsur pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Islam menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, maisir, gharar, dan tindakan dzalim dalam setiap muamalah. Pada setiap harta yang mencapai nishab dan haul ada kewajiban membayar zakat. Di luar itu, Islam menganjurkan kita untuk tolong-menolong sesama manusia dengan menggemarkan infaq, shodaqoh, hadiah dan hibah.

Menurut Umar Chapra, ada empat tujuan utama pembangunan ekonomi Islam: roda ekonomi bergulir dalam bingkai nilai dan norma Islam, menciptakan keadilan dan persaudaraan yang universal, adanya distribusi pendapatan, dan menjamin kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Bagaimana mengukur maslahat harta? Ini bisa didekati melalui indikator seperti jumlah muzakki per wilayah, jumlah mustahik per wilayah, jumlah lembaga amil zakat, jumlah produk halal, adanya lembaga hisbah, lembaga pengawas persaingan usaha, lembaga penjamin produk halal, jumlah konsultasi usaha dan produk halal per wilayah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas kita bisa menarik pelajaran bahwa berbagai indikator keberhasilan pembangunan --mulai dari PDB dan pendapatan perkapita, IPM, Ikrar, Eurostat, kesejahteraan ekonomi-- yang nota bene baru

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal

menyentuh aspek statistika keduniawian sesungguhnya bisa diperkaya dengan menambah nuansa maqasid al-syariah sehingga diperoleh ukuran keberhasilan yang lebih sempurna dan menyeluruh.

Jika pendekatan itu dilakukan, kita akan mendapatkan indeks kemaslahatan pembangunan (IKP) sebagai indikator alternatif dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi Islam. IKP merupakan akumulasi dari berbagai indikator kemaslahatan dalam lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu: keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, Euis. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer*. (p.258).

Az-Zuhailly, Wahbah. (1998). *Ushul al-fiqh al-islami*. p1045. Beirut: Dar al-Fikr.

Chapra, M. Umar. (2005). *Objectives of the islamic economic order*. In Sheikh Ghazali Sheikh Abod, Syed Omar Syed Aqil, & Aidit Hj. Ghazali (Eds). *An introduction to islamic economics & finance*. (pp. 3-29). Kuala Lumpur: Cert.

Chapra, M. Umer. (2001). *The future of economic: an islamic perspective*. p.124. Jakarta: SEBI.

Davies, A. and G. Quinlivan (2006). *A panel data analysis of the impact of trade on human development*. *Journal of Socioeconomics*.

Djojohadikusumo, Sumitro. (1960). *Ekonomi Pembangunan*, p2-3. Jakarta:PT Pembangunan.

Junaedi, Dedi. 2018. Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam. Artikel dalam *Sainstek Mutakhir* (www.dedijunaedi.com) 14 September 2016.

Junaedi, Dedi; dan Nufus, Sri Hayatin. 2019. Mengukur Indeks Kemaslahatan BPRS Amanah Ummah Bogor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 1 Nomor 1, 2019. <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/-alkharaj/issue/view/5>

Khalil, Jafril. (2010). *Jihad ekonomi Islam*. p.49. Jakarta: Gramata.

Kompas. *Pemerintah luncurkan indeks kesejahteraan rakyat*. Kompas, 2012, Maret 21. (<http://www.kompas.com>)

Qardhawi, Yusuf. (1995). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*.

[Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, & Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Trans]

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

p.25 dan p.367. Jakarta: Rabbani Press.

Sen, Amartya., Stiglitz, J.E., & Fitoussi, J.P. (2010). *Mengukur kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan?* [Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur, trans] p.152. Jakarta: Margin Kiri.

Zahrah, M.A. (2011). *Ushul fiqih* (14th). [Saefullah Ma'shum, & Muntaha Azhari, Trans]. p.550. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Profil Penulis

Ir H Dedi Junaedi MSi (GS eCUThQ4AAAAJ&hl) dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Nasional Laa Roiba Bogor. Lektor ekonomi dan keuangan syariah ini mengampu mata kuliah: matematika ekbis, analisa statistik, fiskal moneter, pengantar manajemen bisnis, komunikasi bisnis, mikroekonomi syariah, etka bisnis syariah, dan Bahasa Indonesia.



Lahir di Kuningan, Jawa Barat,

13 Juni 1964, dia alumni S-1 Teknologi Pangan & Gizi Fateta Institut Pertanian Bogor dan S-2 Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia (UI) dengan predikat lulusan terbaik Pasca-sarjana UI 2012. Pemenang terbaik lomba karya tulis Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 2019 dan Asuransi Syariah 2020 ini pernah menjadi Tenaga Ahli Mentan Bidang Informasi dan Komunikasi (2005-2014). Setelah memimpin Pusat Riset dan Kajian Strategis (PRKS) FEBI INAIS dengan tugas khusus mengelola *El-Mâl: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* (2017-2018), dia menjabat Kepala Bidang Penelitian LPPM IAI-N Laa Roiba Bogor, serta mengelola empat jurnal kampus: *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *As-Syar'î*, *Jurnal Dirosah Islamiyah*, dan *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.

Selain mengajar, Sekretaris MES Bogor ini aktif sebagai jurnalis. Antara lain anggota Dewan Redaksi majalah *Sains Indonesia*

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal

(www.sainsindonesia.co.id), redaktur di Majalah *Gontor* dan *Gontornews* (www.gontornews.com). Alumni LPDS Jakarta 1990 ini juga pernah menjadi redaktur di *Harian Pelita*, *Harian REPUBLIKA*, serta majalah majalah *Suara Hidayatullah* dan *dMaestro*.

Pernah menjadi Asisten Kimia Dasar IPB, guru kimia TEKNOS Jakarta dan supervisor PT Alfindo Putra Setia [AdeS] Cibinong, mantan Ketua Dewan Karyawan REPUBLIKA (2000-2003) ini pernah meraih belasan penghargaan lomba tulis ilmiah populer bidang ristek, DRN, teknologi perbankan, komputer dan telekomunikasi, serta menulis 13 buku. Antara lain *Sainstek Mutakhir Seri 2* (2018), *Sainstek Mutakhir Seri 1* (2017), *Direktori Lembaga Litbang Indonesia* (2016), *Kisah Inspiratif: Dari Proyek Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat* (2015), *PUAP Syariah vs Konvensional: Studi Komparasi Kinerja LKMA* (2013), *Membangun Asa Petani: Bunga Rampai Mentan Menyapa* (2013), *Menuju Ketahanan Pangan* (2012), biografi *Anton Apriyantono, Pemimpin Bersahaja Sahabat Petani* (2009), *Kebangkitan Pertanian Indonesia* (2008), *Konspirasi Bom Bali* (2002), *Agenda Tersembunyi Tragedi WTC* (2001), dan *Klinik Komputer* (1998).